

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DUMPING EKSPOR KERTAS
FOTOCOPY INDONESIA KE JEPANG TAHUN 2012**

R. Aulia Annisa

1301110437

PEMBIMBING : Indra Pahawan, S.IP, M.Si

(rajaauliaannisa@gmail.com)

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

This research discusses about the finishing process of dumping dispute of Indonesia's export fotocopy paper to Japan in 2012. In May 10th 2012, The Economy Minister of Trade and Industry and Japan Financial department accepted the petition of anti-dumping obligation from eight paper manufacture companies in Japan toward cut sheet paper with HS No. 4802.62 Indonesia with Margin Dumping 7,55%-15,78%. In discussing the finishing process of dumping dispute of Indonesia's fotocopy to Japan in 201, the writer uses qualitative research method with library research that comes from literature sources such as book, journal, magazine, and various science article. The prespective that is used is merchantilism. The analyze level that is used is Nation-State. The theory that is used is the dispute finishing theory. In June 26th 2013, The Anti-dumping authority of Japan announces that the result of the dispute of Indonesia's fotocopy paper eksport dumping to Japan is negative, with dumping marginhj, namely as big - 4,03% for PT Anugrah Kertas Utama (AKU) and -4,99% for PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. And OAD of Japan doesn't put import duty of Anti Dumping into effect toward Indonesia's fotocopy paper.

Key words : Trade Dispute, Cut Sheet Paper, Merchantilsm

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan menjadi rumah bagi beberapa jenis keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil dan muncul sebagai pemimpin di kawasannya¹. Demokrasi yang masih muda, kekuatan ekonomi yang baru muncul dan lokasinya yang strategis membuat negara dengan jumlah penduduk yang besar ini menjadi mitra penting bagi Jepang.

Dengan kemampuan diplomasi, kekuatan ekonomi, potensi militer yang dimiliki Jepang serta keeratn aliansi dengan Amerika Serikat, Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia yang diperhitungkan dalam menentukan strategi politik, keamanan maupun ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik.

Posisi strategis Jepang telah mendorong Indonesia untuk menempatkan Jepang sebagai salah satu mitra penting dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di berbagai bidang kehidupan, baik untuk program pembangunan nasional maupun keikutsertaannya dalam menjaga ketertiban dunia sesuai Pembukaan UUD 1945 melalui berbagai kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

Hubungan pada tingkat diplomatik didasarkan pada perjanjian Perdamaian antara

Republik Indonesia dan Jepang pada bulan Januari 1958, serta ditandatanganinya perjanjian perang sebagai bentuk penggantian kerugian yang diakibatkan oleh Jepang di Indonesia pada masa perang dahulu. Kemudian Indonesia membuat kantor perwakilan Indonesia di Jepang dan dilanjutkan dengan penempatan konsulat jendral sebagai langkah awal untuk mempermudah melakukan perundingan mengenai pemampasan perang tersebut². Sejak itu hubungan bilateral antara kedua negara berlangsung baik, dan terus berkembang tanpa mengalami hambatan berarti.

Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Jepang adalah salah satunya pulp dan kertas. Pulp dan kertas adalah Bubur kertas dan kertas, pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semikimia, kimia)³. Pulp terdiri dari serat - serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas yang menghasilkan berbagai produk kertas seperti kertas fotocopy, tisu, kardus, dan lain sebagainya.

Industri *Pulp* (bubur kertas) dan *Paper* (kertas) merupakan salah satu industri di Indonesia yang memiliki prospek cerah di masa mendatang yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan proses produksi secara efisien yang disertai

¹ Profil Indonesia, diakses melalui https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/120216_INDONESIA_Country%20Profile_CLEARED%20%28Indonesia%29.pdf, pada 15 mei 2017

² "Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang", KEDUTAAN BESAR JEPANG DI INDONESIA, diakses dari

http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html, pada tanggal 5 mei 2017

³Program Reduksi Dampak Lingkungan Kehutanan Pulp an Paper diakses dari http://www.wwf.or.id/program/reduksi_dampak_lingkungan/kehutanan/pulp_and_paper/, pada 4 Februari 2017

dengan biaya upah yang relatif rendah turut mendukung berkembangnya industri pulp dan kertas Indonesia.⁴

Tabel 1.1 Kapasitas Produksi Pulp dan Kertas tahun 2007-2012

No	Jenis Industri/Komoditi	Kapasitas Produksi (Ton/Tahun)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pulp	6.697.100	7.9002.100	7.902.100	7.902.100	7.902.100	7.902.100
2	Kertas	10.359.481	12.178.650	12.178.650	12.178.650	14.427.830	14.427.830

SUMBER : Direktorat Jendral Industri Argo

Dari tabel diatas, terlihat bahwa kapasitas produksi pulp selama periode 2007-2012 cenderung stabil, hanya terjadi peningkatan pada tahun 2007-2008 yaitu dari 6.697.100 menjadi 7.902.100. Dari tahun 2008-

2012 kapasitasnya cenderung stabil, tidak terjadi peningkatan ataupun pengurangan. Sedangkan kapasitas kertas selama periode 2007-2012 cenderung meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.2 Realisasi Produksi Pulp dan Kertas Tahun 2007-2012

No	Jenis Industri/Komoditi	Realisasi Produksi (Ton/Tahun)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pulp	6.282.330	5.910.416	6.525.099	7.047.107	7.140.537	7.516.129
2	Kertas	8.680.804	8.251.972	9.308.225	10.518.294	12.446.090	13.482.849

SUMBER : Direktorat Jendral Industri Argo

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi produksi pulp selama periode 2007-2012 mengalami penurunan dan peningkatan. Jika dilihat dari realisasi produksi kertas

selama 2007-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa permintaan akan kertas lebih besar dibandingkan permintaan akan pulp.

⁴ Diakses melalui :
related:lib.ui.ac.id/file?file=digital/126
711-6162-Variabel-variabel-

Pendahuluan.pdf, pada tanggal 1
Desember 2016

Pada akhir tahun 2016, jumlah produksi bertambah sekitar 500.000 ton. Sedangkan kapasitas mesin pulp terpasang 7,9 juta ton dan tahun ini mendapat tambahan 2,5 juta hingga 3 juta ton. Secara total produksi industri pulp dan kertas dapat meningkat menjadi 15,5 juta ton hingga 16 juta ton pada 2017. Dari angka tersebut, mayoritas merupakan produk kertas fotocopy dengan porsi sekitar 40%.⁵ Kertas fotocopy merupakan produksi kertas yang paling banyak diminati di Indonesia maupun di luar Negeri.

Dalam produk *Pulp* dan Kertas khususnya kertas fotocopy, Indonesia merupakan pemasok terbesar kertas fotocopy di Jepang, yakni mencapai 79,1 persen, di peringkat kedua 17,1 persen adalah kertas dari China, menyusul Thailand 1,6 persen dan Taiwan 1,4 persen.⁶ Indonesia menguasai lebih dari setengah pangsa pasar di Jepang dalam produk kertas fotocopy dan mengalahkan China, Thailand, Taiwan sebagai pesaing ekspor nya.

Berdasarkan dari kualitas dan harga, kertas fotocopy dari Indonesia lebih unggul dibandingkam Jepang. Harga jual kertas Indonesia di Jepang 5% lebih murah ketimbang produk dalam negeri Jepang. Harga kertas fotocopy di Jepang sekitar 298 yen per 500 lembar (satu rim).⁷ Seorang

pengusaha kertas di Jepang mengakui sangat terbantu dengan adanya kertas impor dari Indonesia, karena harganya yang relatif murah dan kualitasnya juga lebih bagus, warna kertasnya putih dan bersih, lain dengan kertas buatan Jepang yang kertasnya putih tetapi sedikit kekuningan, harganya juga lebih mahal.

Pada tanggal 10 Mei 2012 Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Perindustrian (METI) dan Departemen Keuangan Jepang (MOF) menerima permohonan pengenaan kewajiban anti-dumping dari delapan perusahaan manufaktur kertas di Jepang terhadap kertas fotocopy (*cut sheet paper*) dengan HS No. 4802.62 Indonesia dengan *Margin dumping* 7,55% - 15,78%.⁸

Pada tanggal 29 Juni 2012 Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Perindustrian Jepang memutuskan untuk memproses keluhan tersebut sesuai prosedur Badan Perdagangan Dunia (WTO) Artikel 8 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade 1994) mengenai kesepakatan Anti-Dumping⁹.

Berdasarkan data Kemenperin, ekspor kertas lokal meningkat drastis ke Jepang. Dari hanya 291.737 ton pada 2008, menjadi 397.510 ton tahun lalu. Terjadi peningkatan

⁵Harian Jurnal Asia, "Kebijakan Anti Dumping Hambat Kinerja Ekspor Produk Kertas Nasional", diakses melalui: <https://www.jurnalasia.com/bisnis/industri/kebijakan-anti-dumping-hambat-kinerja-ekspor-produk-kertas-nasional/>, pada tanggal 4 desember 2016

⁶ Ibid

⁷Kompas news, Diduga Dumping, Jepang Selidiki Kertas Fotokopi Indonesia, diakses melalui : <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/07/08/0322485/diduga.dumping.jepang.selidiki.kertas.fotokopi.indonesia> pada 4 Desember 2016

⁸ Ministry of economy, trade and industry. "METI and MOF Did not Find Dumping of Imports of Cut Sheet Paper Originating in the Republic of Indonesia". Di akses melalui http://www.meti.go.jp/english/press/2013/0626_01.html, pada 4 juni 2017.

⁹ Ministry of economy, trdae and industry, ibid.

hingga 36,3 persen dalam kurun waktu tiga tahun. Akibat impor kertas dari Indonesia meningkat besar, permintaan domestik kertas Jepang mengalami penurunan 2,2%.¹⁰ Seluruh impor kertas Jepang, pangsa kertas Indonesia cukup besar di Jepang. Diduga alasan Jepang menginisiasi tuduhan dumping terhadap Indonesia dikarenakan Jepang ingin memproteksi pasar domestiknya.

Metode dan kerangka pemikiran

Penulis menggunakan perspektif Merkantilisme dalam penelitian ini. Merkantilisme merupakan salah satu perspektif dalam Hubungan Internasional. Perspektif ini muncul sekitar abad ke 16 dengan memandang pentingnya negara berdaulat sebagai elit politik yang utama. Sehingga aktivitas ekonomi seharusnya tunduk pada tujuan utama dalam membangun negara yang kuat, yang dengan kata lain, ekonomi merupakan alat politik dan dasar bagi kekuasaan politik. Secara sempit, merkantilisme diartikan sebagai upaya Negara untuk meningkatkan ekspor dan membatasi impor sehingga memperoleh surplus perdagangan yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (*wealth*) dan kekuasaan (*power*).¹¹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam perspektif merkantilisme peran Negara sangat penting di dalam perekonomian. Untuk menambah dan menjaga

keberlangsungan kekayaan dan kekuasaannya, Negara tidak hanya melakukan intervensi terhadap perkembangan ekonomi dalam negeri, tetapi juga pereconomian internasional.

Konsep yang digunakan penulis adalah Hukum Perdagangan Internasional, Konsep Hukum Perdagangan Internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.¹² Didalam hukum perdagangan internasional terdapat sengketa perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

Teori yang digunakan penulis adalah Teori penyelesaian sengketa menurut Huala Adolf. Upaya-upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian penting dimasyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditunjukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.¹³ Peranan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang

¹⁰ Harian Ekonomi Neraca, Tuduhan dumping kertas keliru, diakses melalui : <http://www.kemenperin.go.id/artikel/4842/> Menperin:-Tuduhan-Dumping-Kertas-Keliru, pada 4 Desember 2016

¹¹ David N. Balaam dan Michael Veseth, *Introduction to International Political*

Economy. Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1996, hal.22

¹² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 1

¹³ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

bersengketa menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional. penyelesaian sengketa menurut Hualadolf terbagi beberapa jenis, yaitu : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Pengadilan. Dari kelima cara penyelesaian sengketa perdagangan internasional diatas, penulis menggunakan penyelesaian sengketa melalui cara mediasi, sebab sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Indonesia dan Jepang sepakat menyelesaikan permasalahannya secara damai, dan mengikuti prosedur penyelidikan sesuai dengan aturan *World Trade Organization* (WTO), serta melibatkan otoritas antidumping sebagai pihak ketiga nya (Mediator).

Pembahasan

Posisi strategis Jepang telah mendorong Indonesia untuk menempatkan Jepang sebagai salah satu mitra penting dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di berbagai bidang kehidupan, baik untuk program pembangunan nasional maupun keikutsertaannya dalam menjaga ketertiban dunia sesuai Pembukaan UUD 1945 melalui berbagai kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

Hubungan pada tingkat diplomatik didasarkan pada perjanjian Perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang pada bulan Januari 1958, serta ditandatanganinya perjanjian perang

sebagai bentuk penggantian kerugian yang diakibatkan oleh Jepang di Indonesia pada masa perang dahulu. Kemudian Indonesia membuat kantor perwakilan Indonesia di Jepang dan dilanjutkan dengan penempatan konsulat jendral sebagai langkah awal untuk mempermudah melakukan perundingan mengenai pemampasan perang tersebut¹⁴. Sejak itu hubungan bilateral antara kedua negara berlangsung baik, dan terus berkembang tanpa mengalami hambatan berarti.

Eratnya hubungan bilateral kedua negara tersebut juga terlihat dalam berbagai persetujuan yang ditandatangani maupun pertukaran nota oleh kedua pemerintah, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi kerjasama di berbagai bidang.

Sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang antara pemerintah Indonesia dan Jepang telah dilakukan sekitar 200 pertukaran nota yang menyangkut kerjasama di bidang perikanan pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan dan bantuan keuangan Jepang¹⁵. Hubungan antara Indonesia dan Jepang terlihat baik dengan adanya kerja sama dan perjanjian di berbagai bidang.

Tingginya intensitas kunjungan timbal-balik di antara pemimpin dan pejabat tinggi antara Indonesia dan Jepang. Kaisar Jepang berkunjung ke Indonesia tahun 1991 dan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah

¹⁴ "Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang", KEDUTAAN BESAR JEPANG DI INDONESIA, diakses dari

http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html, pada tanggal 5 mei 2017

¹⁵ ibid

berkunjung ke Jepang. Sejak Indonesia dilanda krisis dan mengalami bencana tsunami, Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi telah berkunjung 4 kali ke Indonesia¹⁶. Kunjungan timbal balik pada tingkat Menteri khususnya Menteri Luar Negeri, Menteri bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, para pejabat tinggi, politisi dan cendekiawan dari berbagai bidang serta seniman juga berlangsung dengan intensif.

Negara Indonesia dan Jepang juga terjalin kerjasama erat sebagai sesama anggota organisasi / forum regional dan internasional seperti PBB, ESCAP, APEC, WTO dan ASEM. Dalam kerangka kerjasama regional ASEAN, Jepang merupakan salah satu mitra dialog utama dan anggota ARF. Di suasana krisis Jepang tetap memandang Indonesia sebagai stabilisator di kawasan Asia Tenggara.

Jepang memiliki kepentingan agar kerjasama dengan Indonesia dapat dilanjutkan dalam berbagai forum internasional dalam bentuk dukungan timbal balik, baik kepada posisi negara maupun kepada calon negara masing-masing, di sejumlah organisasi regional dan internasional, termasuk pada sidang Komisi HAM, PBB dan Sidang Sub-Komisi PDPM, PBB.

Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang di Bidang Ekonomi

Bantuan pendanaan kegiatan pembangunan yang diberikan Jepang selama ini telah menempatkannya sebagai negara penyumbang terbesar bagi negara berkembang salah satunya Indonesia. Salah satu bentuk bantuan tersebut adalah *Official*

Development Assistance (ODA), yang bergerak di bidang bantuan pembangunan ekonomi negara berkembang hingga bantuan untuk bencana alam.

Bantuan yang diberikan oleh Jepang melalui ODA dalam bentuk adanya pelatihan yang diberikan ke dalam 3 bidang yakni dalam masalah kesehatan, pertanian dan bahkan transportasi. Yang sejak saat itu Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah Jepang. ODA memiliki beberapa kategori bantuan yakni, pinjaman yen, bantuan dana hibah dan kerjasama teknik. ODA juga berpartisipasi dalam serangkaian bantuan bencana alam yang di alami Indonesia seperti perbaikan struktur dan infrastruktur pasca tsunami di Aceh tahun 2004 lalu¹⁷. Sejak tahun 1987, Indonesia juga termasuk negara terbesar yang menyerap ODA Jepang.

Hubungan ekonomi Indonesia-Jepang semakin menguat yang ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Jepang selama bulan Januari sampai dengan Agustus 2011 adalah sebesar USD 35,1 milyar, meningkat sebesar 29% dari periode yang sama tahun 2010. Total nilai perdagangan Indonesia-Jepang tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar USD 42,7 milyar dan USD 28,4 milyar¹⁸. Menurut pandangan Jepang, Indonesia masih merupakan sumber utama pasokan energi, yakni gas dan batu bara untuk industri serta sumber daya alam lainnya seperti timah dan nikel.

Jepang memandang Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi serta memiliki masyarakat kelas menengah

¹⁶ ibid

¹⁷ Sing, Lim Hua. 2001. "*Peranan Jepang di Asia*". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

¹⁸ Rizki Hakiki Valentine, op. cit.

yang terus tumbuh sehingga meningkatkan keinginan Jepang menanamkan modalnya di Indonesia. Indonesia juga dianggap sebagai pemimpin ASEAN yang memegang peranan besar dalam stabilitas wilayah dan kemakmuran dengan populasi dan GDP Indonesia yang mencapai 40 % dari populasi dan GDP ASEAN. Indonesia menekankan posisi Jepang sebagai mitra strategis sehingga Indonesia siap membuka peluang kerjasama yang lebih luas dan progresif.

Hubungan Bilateral Indonesia-

Jepang dalam Bidang Politik

Kedekatan hubungan politik Indonesia dengan Jepang bisa ditunjukkan dengan kedekatan dan keluwesan hubungan antar kepala negara Indonesia dan kepala pemerintahan Jepang selama puluhan tahun. Keeratan hubungan politik antar dua negara telah membawa konsekuensi logis membaiknya hubungan Indonesia dengan Jepang dalam masalah ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan.

Pada tahun 1999 Jepang memberikan bantuan di bidang politik yaitu bantuan untuk melaksanakan Pemilu, baik dengan memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia maupun ikut serta mengirimkan pemantau pemilu internasional. Hal ini merupakan yang pertama dalam sejarah ODA Jepang di Indonesia.

Pemerintah Jepang juga mulai aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung demokratisasi seperti melibatkan NGO sebagai partner. Dalam *Country Assistance Strategy for Indonesia* tahun 2004, pemerintah Jepang juga

menempatkan penciptaan masyarakat yang demokratis dan adil (*"creation of a democratic and equitable society"*) sebagai pilar kedua dalam prioritas area bantuan.

Adapun kegiatan yang didesain sebagai bagian dari pilar kedua tersebut adalah pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan pertanian dan perikanan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan jasa publik di bidang pendidikan, kesehatan dan obat-obatan; reformasi pemerintah di bidang hukum (*judiciary*), polisi (*police service*), bantuan untuk desentralisasi; serta pemeliharaan lingkungan dan pencegahan bencana.¹⁹

Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang di Bidang Sosial Budaya dan Pariwisata

Hubungan sosial budaya antara Indonesia dan Jepang telah terjalin dengan baik sejak lama. Untuk memwadahi jalinan hubungan kerjasama yang lebih baik, telah dibentuk beberapa lembaga persahabatan Jepang dan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah: *Japan-Indonesia Association* (Japinda), *Organization Council Japan-Indonesia Friendship* (*Nihon-Indonesia Yukodantai Kyogikai*), *Tokyo Lagu-Lagu kai*, *Tanah Air kai*, *Merah Putih kai*, *Yayasan Gesang*, *Teman Sejati kai*, *Hokaido-Indonesia kai*, *Hiroshima-Indonesia kai*, *Kyoto-Indonesia Yuko Kyokai*, *Kansai-Indonesia Yuko Kyokai*, *Okinawa-Indonesia Yuko Kyokai*, *Nagasaki-Indonesia Yuko Kyokai*, *Kyushu-Indonesia Yuko Kyokai*, dan *Garuda Kumamoto kai*²⁰.

¹⁹ Ibid

²⁰ Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang. Loc.cit

Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang kepariwisataan juga melibatkan organisasi yang bergerak dalam sector kepariwisataan untuk mengurangi halangan dan kesulitan dalam kepariwisataan. Untuk mendukung kerjasama ini biro perjalanan Jepang Japan Association of Travel Agent (JATA) telah mengirimkan misinya sebanyak dua kali ke Bali mengingat pernah terjadi pemboman pada tahun 2002 untuk memastikan keamanan dan keselamatan para wisatawan.

Pada tahun 2000, untuk pertama kali Indonesia sebagai tujuan wisata bagi Jepang ke dalam jajaran *Top Ten Destinations*. Secara statistik, jumlah wisatawan Jepang ke Indonesia menunjukkan perkembangan yang fluktuatif sesuai dengan persepsi situasi perkembangan keamanan di Indonesia.

Pada tahun 1999, jumlah wisatawan Jepang ke Indonesia mencapai 519.550 dan pada tahun 2000, jumlah tersebut meningkat menjadi 662.045 orang. Pada tahun 2001, menurun menjadi 611.314 orang. Pada tahun 2002, meningkat kembali menjadi 620.722 orang. Pada tahun 2003, menurun menjadi 463.088 orang.²¹

Pada tahun 2004, wisatawan Jepang meningkat menjadi 615.720 orang, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 517.879 orang dan pada tahun 2006 menjadi 419.213 orang. Data dari Departemen Budaya dan Pariwisata (DepBudPar) pada tahun 2007 menunjukkan bahwa wisatawan Jepang yang berkunjung ke Indonesia tercatat sebanyak 508.820 orang.²²

Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Ada Lima hal utama dalam kerjasama pertahanan keamanan dan militer antara Indonesia dan Jepang adalah pendidikan, latihan, sumber daya manusia, industri pertahanan, penanganan terorisme, dan manajemen penanggulangan bencana. Kerjasama militer Indonesia dan Jepang diwujudkan melalui sinergi antara TNI angkatan darat dan pasukan beladiri Jepang.

Selain kerjasama di atas, pemerintah Indonesia dan Jepang juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, Asia Pasifik dan Asia Timur. Kedua negara sepakat untuk memelihara dan berkontribusi aktif dalam memelihara stabilitas kawasan. Indonesia mengerti tentang keinginan Jepang untuk lebih berperan lebih luas dalam bidang keamanan dengan tujuan bisa ikut berkontribusi dalam penciptaan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia. Indonesia juga menyarankan agar dibangun kerja sama lebih erat lagi antara Jepang dan Indonesia, antara Jepang dengan negara-negara di kawasan ASEAN agar semua dapat berkontribusi pada perdamaian yang sama-sama diinginkan oleh semua pihak.

Pada kesempatan kunjungan ke Jepang, 16-18 Juni 2011, Presiden RI melakukan peninjauan ke wilayah bencana di kota Kesennuma, Jepang. Pada kesempatan tersebut secara simbolis juga diserahkan dana bantuan bagi pemulihan dan rekonstruksi kota Kesennuma sebesar USD 2 juta kepada Walikota Kesennuma oleh Mentri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), serta

²¹ Ibid

²² Ibid

penandatanganan prasasti tanda persahabatan dan solidaritas rakyat Indonesia bagi masyarakat Jepang oleh Presiden RI.

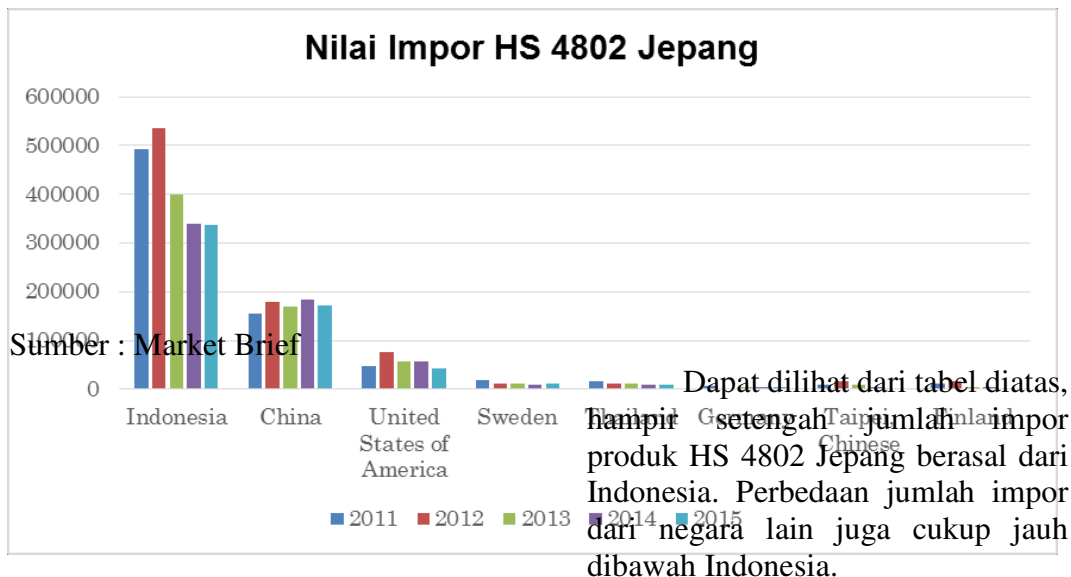
Kerjasama Perdagangan

Indonesia-Jepang dalam Ekspor

Kertas Fotocopy

Partner terbesar Indonesia di pasar ekspor-impor produk HS 4802 (paper / kertas) adalah Jepang. Produk HS 4802 yaitu, uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punch card and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets of any size, other than paper of heading 4801 (newsprint) or 4803 (toilet paper); handmade paper and paperboard

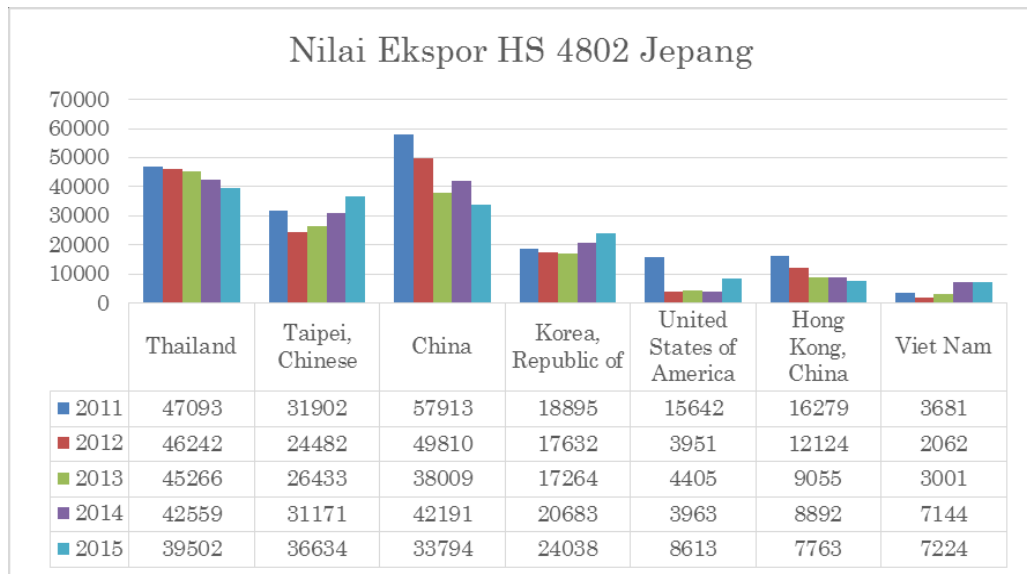
3.1 Nilai Impor Produk HS 4802 di Jepang dari beberapa Negara di dunia tahun (2011-2015)



Grafik 3.2 Nilai ekspor HS 4802 Jepang ke beberapa negara tujuan tahun 2011-2015

²³ Market Brief, "Uncoated paper for writing, printing HS 4802" Op.cit. hal 3

²⁴ Ibid, hlm. 7



Sumber : Market Brief

Sebaliknya dilihat dari jumlah ekspor Jepang, yaitu terbesar ekspornya ke China, diurutan kedua Thailand, selanjutnya Taipei, Korea, Hongkong, Amerika, dan diurutan terakhir ada Vietnam. Sebagian besar produk HS 4802 yang diimpor Jepang digunakan untuk keperluan konsumsi dalam negeri, baik sebagai bahan dasar untuk memproduksi benda kerajinan lain atau digunakan sebagai produk konsumsi sehari – hari.

Jepang merupakan salah satu negara tujuan ekspor kertas fotocopy dengan pangsa 15% dari total ekspor kertas Indonesia. Ekspor kertas fotocopy ke Jepang pada 2011 mencapai 96.740,6 ton setara dengan US\$111,64 juta. Pada bulan Januari-April 2012 ekspor kertas fotocopy ke negara Jepang mencapai 85.678,75 ton atau setara dengan US\$98,59 juta atau melonjak 900,11% dibandingkan realisasi periode tahun 2011²⁵.

Di sisi produksi, Indonesia menghasilkan 12 juta ton kertas per

tahun. Pada akhir tahun 2016, jumlahnya bertambah menjadi 500.000 ton. Sedangkan kapasitas mesin pulp yang terpasang 7,9 juta ton dan tahun ini mendapat tambahan 2,5 juta ton hingga 3 juta ton²⁶. Secara total produksi industri pulp dan kertas dapat meningkat menjadi 15,5 juta ton hingga 16 juta ton pada 2017.

Dari angka tersebut, mayoritas merupakan produk kertas fotocopy dengan porsi sekitar 40%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kertas dan barang dari kertas sepanjang bulan Januari-Agustus 2016 menyusut 6,61% menjadi US\$3,37 juta dari periode yang sama tahun lalu sebesar US\$3,62 juta.

Proses Penyelesaian Sengketa Dumping Ekspor Kertas Fotocopy Indonesia di Jepang

Pada tanggal 10 Mei 2012 Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Perindustrian (METI) dan Departemen Keuangan Jepang (MOF) menerima permohonan

²⁶ Harian Jurnal Asia, “Kebijakan Anti Dumping Hambat Kinerja Ekspor Produk Kertas Nasional”, diakses

melalui: <https://www.jurnalasia.com/bisnis/industri/kebijakan-anti-dumping-hambat-kinerja-ekspor-produk-kertas-nasional/>, pada tanggal 4 Juni 2017

pengenaan kewajiban anti-dumping dari delapan perusahaan manufaktur kertas di Jepang terhadap kertas fotocopy (*cut sheet paper*) dengan HS No. 4802.62 Indonesia²⁷.

Setelah ditemukan beberapa bukti yang kuat, pada tanggal 29 Juni 2012 Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Perindustrian Jepang memutuskan untuk memproses keluhan tersebut sesuai prosedur Badan Perdagangan Dunia (WTO) Artikel 8 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade 1994) mengenai kesepakatan Anti-Dumping²⁸.

Delapan perusahaan manufaktur kertas Jepang tersebut yaitu, Nippon Paper Industries Co.Ltd., Nippon Daishowa Paperboard Co.Ltd., Oji Paper Co.Ltd., Oji Speciality Paper Co.Ltd., Daio Paper Corporation, Hokuetsu Kishu Paper Co.Ltd., Mitsubishi Paper Mills Limited, dan Marusumi Paper Co.Ltd²⁹.

Terdapat 11 perusahaan yang dituduh melakukan dumping, yaitu PT India Kiat Pulp and Paper Tbk, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk, PT Kertas Leces (Persero), PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Parisindo Pratama, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PTRiau Andalan Kertas, PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Suparma Tbk, PT Surabaya Agung Industri Pulp and Kertas Tbk. Tudingan tersebut diajukan oleh sejumlah perusahaan kertas di Jepang.

Indonesia merasa bahwa tuduhan dumping ini adalah bentuk proteksi Jepang terhadap industri lokalnya sendiri, karena dilihat dari definisi dumping itu adalah tuduhan di mana Indonesia mengenakan harga jual di Jepang lebih murah daripada dijual di lokal (Indonesia). Produk APP yang diekspor ke Jepang adalah produk spesifik yang dibuat untuk memenuhi permintaan dan selera konsumen Jepang, dan tidak dijual di pasar dalam negeri Indonesia. Jika ada tuduhan dumping, maka tidak terlalu tepat karena perbandingannya tidak seimbang dan tidak *fair*.

Produk kertas fotocopy dari Indonesia di Jepang sudah 15 tahun beredar dan semakin lama memang semakin banyak peminat kertas fotocopy di negeri Jepang ini. Indonesia telah mengeksport kertas fotocopy ke Jepang selama 15 tahun sangat tidak wajar apabila Indonesia melakukan praktik dumping. Para produsen dari Indonesia mengharapkan kasus dumping ini segera diselesaikan, mengingat Indonesia merupakan pemasok terbesar kertas fotocopy di Jepang.

Proses penyelesaian sengketa dumping kertas fotocopy ini dilakukan dengan cara mediasi dibawah pengawasan pihak ketiga yaitu Otoritas Anti Dumping Indonesia dan Otoritas Anti Dumping Jepang. Pada bulan juli Otoritas nti Dumping Jepang mengirim petisi dan kuesioner kepada 11 perusahaan Indonesia yang mengeksport kertas fotocopy ke Jepang.

²⁷ Ministry of economy, trade and industry. "METI and MOF Did not Find Dumping of Imports of Cut Sheet Paper Originating in the Republic of Indonesia". Di akses melalui

http://www.meti.go.jp/english/press/2013/06_26_01.html, pada 4 juni 2017.

²⁸ Ministry of economy, trade and industry, *ibid*.

²⁹ Ministry of economy, trade and industry, *ibid*.

Diadakannya diskusi panel mengenai anti-dumping, setelah Jepang mengadakan beberapa investigasi atau mengirim kuesioner terhadap kertas fotocopy Indonesia. Pada 26 Juni 2013, Otoritas Anti Dumping (OAD) Jepang yang telah melakukan penyelidikan anti dumping terhadap produk cut sheet paper dengan HS No. 4802.62 mengumumkan bahwa ekspor kertas fotocopy Indonesia di Jepang hasilnya adalah margin dumping untuk produsen/eksportir Indonesia adalah negatif, yaitu sebesar -4,03% untuk PT Anugrah Kertas Utama (AKU) dan -4,99% untuk PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk³⁰.

Berdasarkan hasil observasi dari Otoritas Anti Dumping Jepang menunjukkan bahwa proses sengketa dumping yang dilakukan oleh METI Jepang tidak terbukti, maka Otoritas Anti Dumping Jepang tidak memberakukan Bea masuk Anti Dumping terhadap produk kertas fotocopy Indonesia (HS 480262). Jepang menekankan bahwa penanganan terhadap daya saing jual beli kertas fotocopy harus dibawah pengawasan hukum kedua negara, dan Jepang mengaggap bahwa hubungan kedua negara harus berada dalam kebijakan persaingan dan kebijakan perdagangan dibawah rezin WTO.

KESIMPULAN

Kerjasama Indonesia dan Jepang di bidang perdagangan barang (ekspor-impor) telah terjalin sejak lama, dan selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Salah satu produk yang di ekspor Indonesia ke Jepang adalah Pulp dan

Kertas, khususnya kertas Fotocopy. Industri *Pulp* (bubur kertas) dan *Paper* (kertas) merupakan salah satu industri di Indonesia yang memiliki prospek cerah di masa mendatang yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia.

Latar belakang Indonesia yang merupakan negara dengan hutan hujan tropis kedua terbesar setelah Brazil yang dapat mendukung ketersediaan bahan baku untuk industri pulp dan kertas, terlebih lagi melalui keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dapat mendorong pertumbuhan industri pulp dan kertas Indonesia. Serta tersedianya sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan proses produksi secara efisien yang disertai dengan biaya upah yang relatif rendah turut mendukung berkembangnya industri pulp dan kertas Indonesia.

Sebagai salah satu hasil produk industri kehutanan, kertas merupakan penyumbang ekspor terbesar, mencapai 2,36 miliar dolar AS dari total ekspor Indonesia. Dari nilai sebesar itu, Jepang berada pada peringkat pertama dari 13 negara tujuan ekspor kertas fotocopy Indonesia. Indonesia menguasai lebih dari setengah pangsa pasar di Jepang dalam produk kertas fotocopy dan mengalahkan China, Thailand, Taiwan sebagai pesaing ekspor nya.

Tingginya volume ekspor kertas fotocopy Indonesia ke Jepang, mengakibatkan industri kertas dalam negeri dikenakan tuduhan *dumping* oleh 8 perusahaan manufaktur Jepang. Pada tanggal 10 Mei 2012 Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Perindustrian (METI) dan Departemen Keuangan Jepang

³⁰ Ministri Of Economy, Trade, Industry. Loc.Cit

(MOF) menerima permohonan pengenaan kewajiban anti-dumping dari delapan perusahaan manufaktur kertas di Jepang terhadap kertas fotocopy (*cut sheet paper*) dengan HS No. 4802.62 Indonesia.

Pada tanggal 29 Juni 2012 Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Perindustrian Jepang memutuskan untuk memproses keluhan tersebut sesuai prosedur Badan Perdagangan Dunia (WTO) Artikel 8 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade 1994) mengenai kesepakatan Anti-Dumping.

Setelah melakukan beberapa investigasi oleh pihak Jepang terhadap Indonesia, Indonesia dan Jepang sepakat untuk menyelesaikan sengketa dumping kertas fotocopy dengan menempuh jalur mediasi, dan melibatkan OAD Indonesia dan OAD Jepang sebagai pihak ketiganya.

Berselang waktu 1 tahun, OAD Jepang mengumumkan keputusan nya mengenai sengketa dumping kertas fotocopy Indonesia dinyatakan negatif, atau tidak terbukti adanya praktik dumping, dengan margin dumping sebesar -4,03% untuk PT Anugrah Kertas Utama (AKU) dan -4,99% untuk PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Jadi, Otoritas Anti Dumping Jepang tidak memberakukan Bea masuk Anti Dumping terhadap produk kertas fotocopy Indonesia (HS 480262).

Daftar Pustaka

BUKU

- David N. Balaam dan Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy*. (Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1996)
- Huala Adolf, 2005, "*Hukum Perdagangan Internasional*", (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2005)

Huala Adolf, 2004, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*", (Sinar Grafika, Jakarta)

Sing, Lim Hua. 2001. "*Peranan Jepang di Asia*". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Mas'oed Mohtar, 1990, "*Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*", (Jakarta: LP3ES)

Mas'oed Mohtar, 2003, "*Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Jurnal

Hari Tjahjono, 2010, "Journal Anti Dumping di Indonesia". (Volume 01 ,Januari - Maret)

Market Brief, 2016, "Uncoated paper for writing, printing HS 4802" (ITPC-Osaka, Januari 2016)

Ministry of economy, trade and industry. "METI and MOF Did not Find Dumping of Imports of Cut Sheet Paper Originating in the Republic of Indonesia". Di akses melalui

http://www.meti.go.jp/english/press/2013/0626_01.html

Nita Anggraeni, 2015, "Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagangan Internasional dan Hukum Islam", (Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Mazahib, Vol XIV, No 2, Desember)